

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Manahan Solo

Pedro Bagus Prakoso, Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: pedrobagus@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Shelter Manahan Solo. Penelitian ini meninjau kepatuhan dan rutinitas birokrasi berdasarkan perspektif Ripley dan Franklin, serta menganalisis faktor determinan keberhasilan menggunakan teori implementasi George C. Edwards III. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang meliputi Dinas Perdagangan, paguyuban PKL, dan pedagang terdampak. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan implementasi—mulai dari sosialisasi, pendataan, hingga relokasi—telah terlaksana dengan tingkat kepatuhan pedagang yang cukup tinggi berkat adanya dukungan regulasi dan manfaat fisik fasilitas baru. Kawasan Shelter Manahan kini lebih tertata dan menarik pengunjung, serta rutinitas operasional seperti sistem *shift* dan retribusi mulai terbangun. Namun, analisis menggunakan dimensi Edwards III menemukan beberapa hambatan signifikan: komunikasi (sosialisasi) yang belum merata, keterbatasan sumber daya (kurangnya tempat penampungan sementara dan kapasitas lapak), serta disposisi pelaksana terkait pembagian lapak yang dinilai belum sepenuhnya adil. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena inkonsistensi koordinasi dan belum meratanya dampak ekonomi bagi pedagang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan konsistensi komunikasi dan penyediaan sarana pendukung yang lebih memadai. (11pt, single line spacing, 1 paragraph).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Revitalisasi PKL, Shelter Manahan, George C. Edwards III, Ripley dan Franklin.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Street Vendor (PKL) revitalization policy at Manahan Shelter, Solo. It examines compliance and bureaucratic routines based on Ripley and Franklin's perspective and analyzes the determinants of success using George C. Edwards III's implementation theory. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, involving the Trade Office, PKL associations, and affected vendors. Data validity was tested through source triangulation with interactive data analysis techniques. The results indicate that implementation stages—ranging from socialization and data collection to relocation—have been carried out with a relatively high level of vendor compliance due to regulatory support and the physical benefits of new facilities. The Manahan Shelter area is now better organized and attracts more visitors, with established operational routines such as shift systems and retribution payments. However, the analysis using Edwards III's dimensions revealed significant obstacles:

uneven communication (socialization), limited resources (lack of temporary shelters and stall capacity), and disposition issues regarding perceived unfair stall distribution. Overall, the policy implementation is not yet fully optimal due to inconsistent coordination and uneven economic impacts on vendors. This study recommends improving communication consistency and providing adequate supporting facilities. (11pt, single line spacing, 1 paragraph).

Keywords: Policy Implementation, PKL Revitalization, Manahan Shelter, George C. Edwards III, Ripley and Franklin.

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan kota sering kali tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja formal, sehingga mendorong masyarakat beralih ke sektor informal, khususnya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Kota Surakarta, penataan PKL menjadi agenda prioritas pemerintah daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu realisasi strategis dari kebijakan tersebut adalah proyek revitalisasi Shelter Manahan yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2022 hingga 2023. Program ini bertujuan mentransformasi kawasan menjadi lebih tertib, estetis, dan fungsional, sekaligus meningkatkan taraf ekonomi pedagang melalui penyediaan fasilitas yang lebih layak.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan kompleks yang melampaui aspek pembangunan fisik semata. Meskipun wajah kawasan Shelter Manahan telah berubah menjadi lebih modern, proses transisi menyisakan sejumlah residu permasalahan. Observasi awal mengidentifikasi kendala signifikan, antara lain ketiadaan tempat penampungan sementara selama masa konstruksi yang membebani pedagang, keterbatasan kapasitas lapak baru yang memaksa sistem berbagi (*sharing*), serta isu keadilan dalam mekanisme pembagian lapak. Selain itu, pola komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah dinilai belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Shelter Manahan Solo ketika ditinjau melalui model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Kedua, penelitian ini juga memerlukan kajian mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan revitalisasi tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan ini berjalan efektif serta kendala apa yang perlu diperbaiki dalam upaya penataan PKL di kawasan tersebut.

Untuk memperkuat landasan analisis, penelitian ini merujuk pada dua studi terdahulu yang memiliki relevansi linear terhadap objek dan teori yang digunakan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Prajasari, Wijaya, dan Saleh (2015) dalam *Wacana:*

Jurnal Sosial dan Humaniora yang secara spesifik mengevaluasi penataan PKL di Surakarta, termasuk di kawasan Manahan. Inti dari penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah telah menggunakan pendekatan persuasif dalam memindahkan pedagang, hasil evaluasi menunjukkan dampak yang beragam, di mana sebagian pedagang masih mengalami penurunan pendapatan dan mengeluhkan sepi pembeli di lokasi baru. Hal ini menandakan bahwa aspek fisik saja tidak cukup menjamin keberhasilan penataan. Kedua, penelitian Haidar Ramadhan (2017) dalam *Jurnal Administrasi Publik Universitas Padjadjaran* yang menganalisis revitalisasi PKL dengan menggunakan kerangka teori implementasi George C. Edwards III, sama seperti penelitian ini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hambatan utama optimalisasi kebijakan terletak pada keterbatasan sumber daya finansial, lemahnya koordinasi antar-organisasi (struktur birokrasi), serta disposisi pelaksana yang kurang konsisten. Kedua penelitian ini menjadi pijakan penting untuk melihat apakah kendala serupa—baik dari sisi konteks lokasi di Solo maupun dimensi teoretis Edwards III—kembali muncul dalam kasus revitalisasi Shelter Manahan saat ini.

Metode

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan fenomena implementasi kebijakan revitalisasi secara mendalam, alamiah, dan utuh. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk mengeksplorasi realitas sosial di lapangan guna membangun pemahaman tentang proses, kendala, dan dampak kebijakan. Lokasi penelitian dipusatkan di dua titik utama, yaitu kawasan Shelter Manahan di Jalan Aipda KS Tubun sebagai objek fisik revitalisasi, dan Kantor Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai instansi pelaksana kebijakan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi Shelter Manahan yang baru saja menyelesaikan proses revitalisasi pada tahun 2022, serta peran sentral Dinas Perdagangan dalam menerbitkan legalitas usaha seperti Surat Izin Penempatan (SIP) bagi para pedagang.

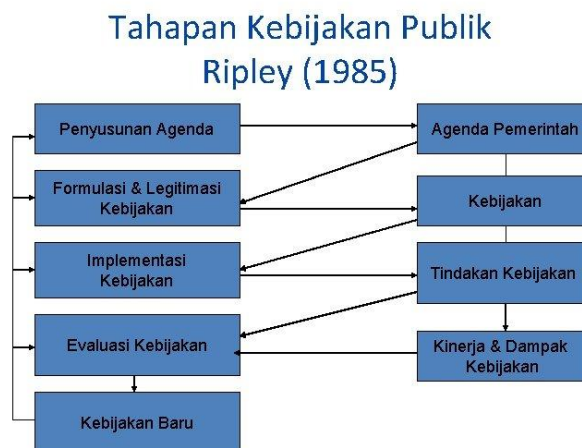
Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan kapasitas dan penguasaan mereka terhadap masalah yang diteliti. Informan kunci dalam studi ini meliputi Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta beserta jajarannya, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR, Ketua Paguyuban PKL "Gotong Royong" dan "Guyub Rukun", serta para pedagang yang terdampak relokasi. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan para informan dan pengamatan lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, arsip regulasi, laporan progres pembangunan, serta literatur pendukung yang relevan untuk memperkuat temuan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka untuk menggali perspektif aktor kebijakan, sementara observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung dinamika interaksi sosial dan rutinitas pedagang di lokasi shelter baru. Validitas data yang terkumpul kemudian diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam hal ini, peneliti membandingkan dan mengecek balik konsistensi informasi yang diperoleh dari perspektif pemerintah (Dinas Perdagangan/DPUPR) dengan keterangan yang disampaikan oleh kelompok sasaran (Paguyuban dan Pedagang) untuk meminimalisir bias subjektivitas.

Dalam konteks penelitian ini, evaluasi diarahkan pada proses implementasi kebijakan revitalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Shelter Manahan Solo, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008. Pendekatan ini menilai sejauh mana aktor-aktor kunci—terutama Dinas Perdagangan, aparat lapangan, dan para PKL—mematuhi prosedur penataan, mekanisme sosialisasi, distribusi lapak, dan aturan pemanfaatan shelter. Sesuai dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986), dimensi kepatuhan menjadi indikator fundamental dalam menilai efektivitas implementasi awal; tanpa kepatuhan terhadap proses yang ditetapkan, keberhasilan substansial kebijakan sulit untuk diukur. Evaluasi ini bertujuan memberikan dasar empiris untuk mendorong tata kelola implementasi yang lebih transparan, konsisten, dan akuntabel.

Gambar 1.

Tahapan Kebijakan Publik Ripley (12pt)



Sumber: Tahap Kebijakan Publik Ripley (1985)

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi ini, penelitian mengadopsi model *top-down* dari George C. Edwards III (1980). Model ini menyoroti empat variabel utama yang saling bergantung: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pertama,

komunikasi menuntut kejelasan, konsistensi, dan transmisi informasi kebijakan yang efektif dari pembuat keputusan kepada pelaksana (Edwards, 1980). Komunikasi dua arah yang lancar sangat penting untuk memastikan pemahaman bersama mengenai tujuan revitalisasi, meminimalkan distorsi informasi, dan mendorong partisipasi pelaksana di lapangan. Kedua, sumber daya yang memadai—mencakup kompetensi aparat pelaksana (SDM), ketersediaan anggaran (finansial), dan kelayakan fasilitas fisik (sarana prasarana)—merupakan prasyarat mutlak agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Ketiga, disposisi pelaksana, yang tercermin dalam sikap, komitmen, dan motivasi aparat birokrasi, sangat menentukan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan. Pelaksana yang memahami dan mendukung tujuan kebijakan cenderung lebih konsisten dalam penegakan aturan dan pembinaan pedagang. Keempat, struktur birokrasi yang efisien memerlukan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang kuat antarinstansi terkait (seperti Dinas Perdagangan dan Satpol PP), serta prosedur kerja yang sederhana untuk menghindari fragmentasi dan memperlancar eksekusi kebijakan. Keempat faktor ini—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—harus beroperasi secara sinergis; kegagalan pada salah satu aspek dapat menghambat keseluruhan proses implementasi. Analisis melalui lensa model Edwards III ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengevaluasi kepatuhan dan mengidentifikasi determinan pendukung maupun penghambat dalam implementasi kebijakan revitalisasi PKL di Shelter Manahan Solo.

Tahap akhir dari metode ini adalah analisis data yang mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Proses analisis berlangsung secara sirkuler yang dimulai dengan kondensasi data (*data condensation*) untuk menyeleksi dan menyederhanakan data lapangan yang kompleks. Data yang telah terorganisir kemudian disusun dalam tahap penyajian data (*data display*) berbentuk teks naratif yang sistematis. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), di mana peneliti menyintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah serta memastikan bahwa kesimpulan yang diambil kredibel dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi Shelter Manahan telah menghasilkan perubahan signifikan pada penataan ruang, pola aktivitas berdagang, serta interaksi sosial dan ekonomi PKL. Secara fisik, revitalisasi mengubah kondisi shelter yang sebelumnya tidak tertata dan minim fasilitas menjadi kawasan terpusat dengan konsep food court yang dilengkapi lapak permanen, listrik, air bersih, sistem drainase, pedestrian, dan area parkir. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan meningkatnya kenyamanan pedagang dan pengunjung dibandingkan kondisi sebelum revitalisasi.

Dari aspek proses kebijakan, penelitian menemukan bahwa implementasi revitalisasi tidak berjalan secara linier. Pada tahap awal, sebagian pedagang mengalami kebingungan dan menunjukkan resistensi karena kurangnya kejelasan informasi mengenai mekanisme relokasi, pembagian lapak, serta jadwal pembangunan. Temuan ini diperoleh dari wawancara dengan pedagang yang menyatakan adanya ketidakpastian selama masa transisi dan kekhawatiran akan kehilangan pelanggan. Namun, setelah shelter mulai beroperasi dan fasilitas dapat dimanfaatkan, persepsi pedagang terhadap kebijakan berangsur berubah menjadi lebih positif.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa komunikasi kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan penerimaan pedagang. Pada awal implementasi, komunikasi pemerintah cenderung bersifat satu arah dan belum menjangkau kebutuhan informasi teknis pedagang secara memadai. Kondisi ini kemudian diimbangi oleh peran paguyuban pedagang yang menjadi saluran komunikasi efektif antara pemerintah dan PKL. Data wawancara menunjukkan bahwa paguyuban berfungsi sebagai mediator yang menyampaikan informasi, menjelaskan kebijakan, serta membangun keyakinan pedagang terhadap manfaat revitalisasi. Temuan ini menjelaskan bahwa komunikasi horizontal dan partisipatif berkontribusi besar dalam mengurangi resistensi kebijakan.

Dari sisi sumber daya, penelitian menemukan bahwa pemerintah telah menyediakan sumber daya fisik yang relatif memadai untuk mendukung aktivitas PKL. Fasilitas yang tersedia meningkatkan kenyamanan dan keamanan berdagang, sehingga sebagian pedagang melaporkan adanya peningkatan jumlah pengunjung, terutama pada waktu-waktu tertentu dan saat berlangsungnya kegiatan di Stadion Manahan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan pada aspek sumber daya finansial dan distribusi lapak. Tidak semua pedagang memperoleh lokasi yang strategis, dan belum terdapat dukungan modal usaha secara langsung dari pemerintah. Temuan ini menjelaskan mengapa dampak revitalisasi terhadap pendapatan pedagang tidak bersifat merata.

Hasil penelitian pada aspek disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan adanya perubahan sikap yang bersifat gradual. Aparat pemerintah cenderung menerapkan pendekatan persuasif dalam menegakkan aturan, sementara pedagang pada awalnya menunjukkan sikap ragu dan defensif. Seiring berjalannya waktu dan setelah manfaat revitalisasi dirasakan secara langsung, sebagian besar pedagang menunjukkan sikap adaptif, termasuk dengan menyesuaikan jenis dagangan dan pola usaha. Data wawancara memperlihatkan bahwa pedagang yang mampu beradaptasi cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari revitalisasi dibandingkan pedagang yang bersikap pasif.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Penelitian menemukan adanya dua lapisan birokrasi, yaitu birokrasi formal pemerintah dan birokrasi sosial yang dijalankan oleh paguyuban pedagang. Birokrasi formal berperan dalam pengaturan, pembangunan, dan pengawasan, sedangkan paguyuban berfungsi sebagai pengelola internal, penghubung aspirasi, dan penjaga

keteraturan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada struktur birokrasi formal, tetapi juga pada keberadaan struktur sosial yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan pedagang.

Berdasarkan evaluasi implementasi menggunakan perspektif Ripley dan Franklin, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan revitalisasi terbentuk secara bertahap. Kepatuhan tidak muncul semata-mata karena adanya aturan dan sanksi, tetapi berkembang melalui pengalaman langsung pedagang terhadap manfaat kebijakan, pengawasan persuasif aparat, serta mekanisme sosial dalam paguyuban. Data lapangan menunjukkan bahwa pedagang mulai mematuhi aturan zonasi, kebersihan, dan jam operasional setelah shelter berfungsi secara optimal dan memberikan keuntungan nyata bagi aktivitas usaha mereka.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan penjelasan terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pendahuluan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi PKL di Shelter Manahan Solo dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi telah diimplementasikan dengan hasil yang relatif efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang berjalan secara formal dan sosial. Dengan demikian, hasil dan analisis penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana kebijakan revitalisasi tersebut menghasilkan dinamika sosial dan ekonomi sebagaimana ditemukan dalam penelitian.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi Shelter Manahan Solo secara substansial berjalan efektif, meskipun diwarnai dinamika resistensi pada tahap awal. Berdasarkan analisis model Ripley dan Franklin, tingkat kepatuhan pedagang menunjukkan tren positif yang signifikan; dari kepatuhan yang rendah di awal akibat minimnya sosialisasi dan ketiadaan lokasi sementara, berubah menjadi kepatuhan kolektif yang kuat setelah manfaat fisik dan ekonomi dari shelter baru yang berkonsep *food court* modern dirasakan secara nyata. Transformasi fisik dari area yang sebelumnya kumuh menjadi fasilitas yang lengkap dan tertib terbukti berdampak positif pada kenyamanan pengunjung dan stabilitas pendapatan pedagang yang mampu beradaptasi. Ditinjau melalui kerangka teori George C. Edwards III, keberhasilan ini sangat didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai dan struktur birokrasi yang efektif melalui sinergi antara instansi pemerintah (Dinas Perdagangan, DPUPR, Satpol PP) dan birokrasi sosial (paguyuban pedagang). Meskipun demikian, variabel komunikasi teridentifikasi sebagai hambatan utama pada fase awal, di mana transmisi informasi yang tidak konsisten dan terlambat sempat memicu kebingungan dan resistensi sementara.

Berdasarkan temuan tersebut, untuk mengoptimalkan keberlanjutan revitalisasi ini dan kebijakan serupa di masa mendatang, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, Pemerintah Kota Surakarta perlu melembagakan forum koordinasi rutin antarinstansi terkait untuk memastikan sinkronisasi pelaksanaan di lapangan. Kedua, strategi sosialisasi kebijakan harus ditingkatkan secara fundamental, baik dari segi frekuensi, konsistensi, maupun variasi metode penyampaian informasi guna meminimalisasi ketidakpastian. Ketiga, sangat krusial untuk meningkatkan partisipasi PKL dengan menempatkan mereka—melalui paguyuban—sebagai aktor kolaboratif yang terlibat aktif dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, bukan sekadar sebagai objek kebijakan.

Referensi

- Adinugraha, H. H., & Janah, S. P. (2021). Analysis of behavior and socio-economic impact of relocation of street vendors during the Covid-19 pandemic. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 9(2), 220–234. <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4763>
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi kebijakan penanganan sampah di kecamatan taman kabupaten sidoarjo. *Publika*, 149–158. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Coleman, J. S. (1986). Social Theory, Social Research, and a Theory of Action. *American Journal of Sociology*, 91(6), 1309–1335. <https://doi.org/10.1086/228423>
- Digdowiseiso, K. (2019). Teori pembangunan. *KENDARI. Journal Publicuho*, 3(1), 67. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Eko Purnomo, & Yitno Puguh Martomo. (2024). Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl Oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 517–523. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1035>
- Gunardi, A. (2020). Implementasi Peraturan daerah kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang retribusi jasa Umum Pada retribusi Pelayanan Pasar flamboyan kota pontianak. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.26418/jpasdev.v1i2.43587>
- Janah, S. P., & Adinugraha, H. H. (2021). Analysis Of Behavior And Sosio-Economic Impact Of Relocation Of Street Vendors During The Covid-19 Pandemic. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(2), 220–234. <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4763>
- Joko Pramono S. Sos., M.Si. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UnisriPress.
- Karuniawan, M. H., Sukma, A. P., & Kurniawan, E. D. (2015). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Masyarakat (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 3(1), 107–116. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.184>

- Lubis, K. (2022). Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik Melalui kegiatan ekstrakurikuler di madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 894–901. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2054>
- Miles, M. B. & Huberman, A. M., 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Miller, P. A. (2002). The Economic Impact of Sports Stadium Construction: The Case of the Construction Industry in St. Louis, Mo. *Journal of Urban Affairs*, 24(2), 159–173. <https://doi.org/10.1111/1467-9906.00120>
- Nasrullah, M. A., & Basuki, P. (2024). Transformasi RTH Taman Tugu Bumi Gora Ke Taman Impian (Taman teras udayana) : Dampak Revitalisasi terhadap kehidupan ekonomi Pedagang Kaki lima. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(6), 874–886. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.12656>
- Nugroho, H. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten sleman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 119–124. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1150>
- Permana, F. I., Yudana, G., & Rahayu, P. (2019). PENGARUH STABILISASI PKL SHELTER MANAHAN TERHADAP KINERJA JALAN MENTERI SUPENO SURAKARTA. *Desa-Kota*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.11340.1-13>
- Prajasari, F., Wijaya, A. F., & Saleh, C. (2015). Policy Evaluation Of Restructuring Street Vendors in Surakarta City (Study of Street Vendors in Monument Park Banjarsari and Street Vendors in Manahan Stadium). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(03), 175–183. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.018.03.4>
- Prasasti, A. N., Ramadhan, D., & Handoko, T. W. (2025). Persepsi Keselamatan jalur pedestrian berdasarkan kelompok usia: Studi Kasus Jalur pedestrian margonda raya, depok. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1925–1937. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.6546>
- S. Sos., , M.Si, J. P. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press.
- Sartika, I., Gatningsih, G., & Syafri, W. (2015). Teori Pembangunan dan Implikasinya diIndonesia.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti., dan Khunaef, Muhmmad Wildan. (2023). *Strategy and Effectiveness of PKL Empowerment by Surakarta Government through Capabilities Regulation of the City of Surakarta Number 3 year 2008*. *Activa Yuris Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.25273/ay.v3i1.16044>
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*, 3(1), 67. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Susilawati, E. (2020). Impelementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Pada Dinas kesehatan Kabupaten Melawi. *JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26418/jpasdev.v1i1.41541>
- Wahab, A. J. (2018). Implementasi kebijakan sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Serang Provinsi banten tahun ANGGARAN 2017. *Harmoni*, 16(2), 307–323. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.8>

Wahyuni, S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 55–68.
[https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1\(2\).9319](https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9319)